

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Persentase rumah tangga menurut provinsi dan memiliki akses terhadap sanitasi layak di Provinsi Bali tahun 2017–2024. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa perubahan tingkat kemiskinan memiliki pengaruh terhadap perubahan Persentase rumah tangga menurut provinsi dan memiliki akses terhadap sanitasi layak di Provinsi Bali. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kemiskinan, semakin rendah Persentase rumah tangga menurut provinsi dan memiliki akses terhadap sanitasi layak yang dimiliki masyarakat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan ekonomi rumah tangga masih menjadi faktor penting dalam menentukan kepemilikan dan pemanfaatan fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan.
2. Kepadatan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Persentase rumah tangga menurut provinsi dan memiliki akses terhadap sanitasi layak di Provinsi Bali tahun 2017–2024. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa perubahan tingkat kepadatan penduduk memiliki pengaruh terhadap perubahan Persentase rumah tangga menurut provinsi dan memiliki akses terhadap sanitasi layak di Provinsi Bali. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepadatan penduduk, semakin tinggi pula Persentase rumah tangga menurut provinsi dan memiliki akses terhadap sanitasi layak yang dimiliki masyarakat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa wilayah dengan konsentrasi penduduk yang tinggi cenderung memiliki penyediaan infrastruktur sanitasi yang lebih efisien, sehingga layanan sanitasi dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Selain itu, daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi umumnya

memiliki tingkat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik dibandingkan wilayah dengan kepadatan penduduk yang rendah.

3. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Persentase rumah tangga menurut provinsi dan memiliki akses terhadap sanitasi layak di Provinsi Bali tahun 2017–2024. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa perubahan tingkat pengangguran memiliki pengaruh terhadap perubahan Persentase rumah tangga menurut provinsi dan memiliki akses terhadap sanitasi layak di Provinsi Bali. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pengangguran di Provinsi Bali tetap diikuti oleh peningkatan Persentase rumah tangga menurut provinsi dan memiliki akses terhadap sanitasi layak. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa akses sanitasi merupakan hasil pembangunan infrastruktur yang bersifat jangka panjang, sehingga tidak secara langsung dipengaruhi oleh perubahan kondisi pasar tenaga kerja. Selain itu, pembangunan infrastruktur sanitasi dan berbagai program pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat tetap berjalan meskipun tingkat pengangguran mengalami fluktuasi.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Teoritis

1. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam penggunaan variabel independen yang hanya mencakup kemiskinan, kepadatan penduduk, dan pengangguran. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk memasukkan variabel tambahan yang secara teoritis maupun empiris berpotensi memengaruhi hasil kajian, sehingga model analisis menjadi lebih komprehensif dan mampu menjelaskan fenomena secara lebih mendalam seperti, tingkat pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), belanja pemerintah sektor kesehatan, akses air bersih, dan tingkat urbanisasi sehingga mampu memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai determinan Persentase rumah tangga menurut provinsi dan memiliki akses terhadap sanitasi layak.

2. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian, tidak hanya pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, tetapi juga pada tingkat nasional atau antarprovinsi agar dapat menggambarkan perbedaan karakteristik wilayah dalam pencapaian persentase rumah tangga menurut provinsi dan memiliki akses terhadap sanitasi layak.

5.2.2 Saran Praktis

1. Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota perlu terus meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur sanitasi, khususnya pada daerah yang masih memiliki tingkat akses sanitasi relatif rendah, seperti Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng, melalui pembangunan sarana sanitasi dan pengelolaan limbah domestik yang memadai.
2. Pemerintah perlu memperkuat program bantuan sanitasi bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui penyediaan jamban sehat, septic tank individual maupun komunal, serta optimalisasi program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
3. Pada wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas infrastruktur sanitasi dan memperbaiki sistem perencanaan tata ruang agar pertumbuhan penduduk tidak menimbulkan tekanan terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.
4. Pemerintah daerah harus membuka lapangan kerja serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat diharapkan mampu memperkuat kapasitas rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk dalam memperoleh akses sanitasi yang layak secara berkelanjutan.
5. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat serta berpartisipasi aktif dalam menjaga dan memanfaatkan fasilitas sanitasi yang telah disediakan demi terciptanya lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.